

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dakwah yang menyeru umatnya untuk senantiasa berbuat *amr ma'ruf nahi munkar*. Persoalan yang pertama kali timbul dalam Islam bukanlah persoalan keyakinan melainkan politik. Permasalahan yang terjadi dalam Islam sebagai agama dakwah terkait dalam hal politik semakin berkembang pada masa Khulafaur Rosyidin. Pada masa tersebut sistem pengangkatan khalifah bukan atas hubungan darah melainkan atas dasar pengangkatan dengan mendapat persetujuan dan pengakuan umat yang dalam istilah Arabnya *bay'ah*.

Pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamankan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legislatif), dan peradilan (yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada). Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" Sedangkan Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab (Rully Chairul Azwar, 2008: 1).

Mencermati ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).

Hubungan fungsional antara politik dan dakwah, sering tidak dimengerti dengan baik oleh sebagian kaum muslimin sehingga banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dengan dakwah. Bahkan, dalam masyarakat ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik, seakan-akan politik mengandung kebohongan, hipokresi, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan dan berbagai konotasi buruk lainnya.

Dalam konteks ini akan menjelaskan hubungan politik dan dakwah dalam kacamata Islam. Kegiatan politik tidak perlu bertentangan dengan kegiatan dakwah. Sekaligus diharapkan dapat menghilangkan persepsi yang salah tentang politik dan juga tentang dakwah. Anggapan yang salah, misalnya bahwa politik itu bersifat memecah, sedangkan dakwah bertujuan merangkul sebanyak mungkin umat manusia, seolah ada perbedaan antara hakekat politik dan hakekat dakwah, sehingga berlaku ungkapan yang mengatakan "*Idha dakholat as-siyasatu fi syaiin afsadathu*" (bila politik sampai memasuki sesuatu bidang kehidupan tertentu, maka rusaklah bidang itu).

Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad saw agar menyeru umat manusia ke jalan Allah. Dalam menyeru umat manusia ke jalan Allah itu Nabi beserta

para pengikutnya bersandar pada keterangan-keterangan yang jelas dan sambil memuji kesucian Allah, Nabi menjelaskan bahwa beliau bukan tergolong orang-orang musyrik. Dakwah dalam ayat ini adalah “*al-dakwah ila Allah*” (*ad’u ila Allah*), yaitu seruan, ajakan, panggilan dan imbauan kepada Allah.

Kegiatan dakwah Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, berhubung amar ma’ruf dan nahi munkar, juga meliputi seluruh kegiatan kehidupan. Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa para pendukung amar munkar dan nahi ma’ruf juga menggunakan setiap jalur kegiatan kehidupan. Dengan demikian, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya dapat dijadikan kegiatan dakwah; baik dakwah Islamiyah maupun dakwah jahiliyah, yakni dakwah yang menjadikan neraka sebagai muara akhir.

Dakwah adalah gerakan dalam berbagai bidang kehidupan secara simultan untuk mengubah status quo, agar nilai-nilai Islam memperoleh kesempatan untuk tumbuh subur demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Perubahan sendiri dapat bersifat reformatif atau revolusioner, tergantung pada situasi sosial, politik, ekonomi dan situasi mental-psikologik suatu masyarakat. Tauhid sebagai ruh dakwah mendorong rekonstruksi sosial yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Dengan perkataan lain, dakwah yang bersendikan tauhid senantiasa berusaha memasyarakatkan Islam sebagai agama, sebagai pandangan hidup dan sebagai paradigma pemecahan setiap masalah yang timbul dalam masyarakat modern dengan segala macam manifestasinya, dengan segala pencabangan dan perinciannya.

Dakwah dalam upayanya menyeru kepada perintah Allah Swt., dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Swt., pada gilirannya hal tersebut menjadi bukti bahwa aplikasi ajaran dakwah islam merupakan ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Dakwah berfungsi pula, sebagai suatu usaha menciptakan sebuah tatanan kehidupan di dunia sebagai pengembaraan manusia untuk kembali ke sisi Tuhannya.

Dakwah sebagai upaya penyebaran syari'at Islam juga bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada umat manusia. Kebahagiaan akan tercapai, apabila ajaran Islam dijadikan pedoman hidup, dan segala yang telah diperintahkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

Kegiatan dakwah pada saat ini semakin berat dan kompleks. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang dihadapi oleh para da'i (juru dakwah) semakin berkembang dan kompleks pula. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam menyebabkan para da'i berhadapan dengan suatu zaman yang masyarakatnya menjalani pola hidup serba instan (segala sesuatu ingin cepat dan mudah), sehingga membuat masyarakat berpikir dan bertingkah laku pula secara instan.

Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, penyelenggaraan dakwah tidak akan efektif dan efisien apabila dilakukan perorangan dan tidak berkesinambungan. Tetapi harus diselenggarakan secara bersama-sama dalam satu- kesatuan gerakan yang tersusun secara rapi dan terorganisir, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan. Sehingga

tujuan dakwah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Demikian pula perkataan (*qawl*) dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib:

الْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

“Kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisir”.

Qawl ini mengingatkan kita tentang pentingnya pengorganisasian dan sebaliknya bahayanya suatu kebenaran yang tidak terorganisir melalui langkah-langkah kongkrit, taktik, dan strategi yang mantap. Maka tidak ada garansi bagi perkumpulan apapun yang menggunakan identitas Islam meskipun memenangkan pertandingan, persaingan maupun perlawanan jika tidak dilakukan pengorganisasian yang kuat.

Islam sebagai agama dakwah yang memerintahkan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Namun demikian penyebarluasan Islam itu harus diorganisasikan dengan baik,

dan usaha menyebarkan Islam serta merealisasikan ajarannya di tengah-tengah kehidupan manusia merupakan usaha dakwah.

Pengorganisasian adalah menghimpun dan mengatur sumber daya manusia yang dimiliki ke dalam suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zaini Muchtarom, 2001: 15-16). Didalam suatu organisasi maupun partai politik sangat diperlukan salah satu fungsi manajemen yaitu pengorganisasian yang dapat dirumuskan sebagai serangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi.

Aktivitas penyelenggaraan organisasi akan semakin kompleks, hal ini dikarenakan masalah-masalah yang akan dihadapi dakwah akan semakin bertambah banyak sesuai dengan akses kemajuan informasi dan teknologi serta perkembangan zaman. Berbagai kompleksitasnya permasalahan yang terjadi, kelemahan dakwah lebih banyak dalam hal pengorganisasian dan manajemen.

Sejarah Islam tidak terlepas dari persoalan politik dan perkembangan politik juga tidak terlepas dari adanya pemanfaatan fungsi pengorganisasian yang merupakan salah satu bentuk fungsi manajemen. Pengorganisasian dapat menjadi langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya (Ahmad Fadli, 2002:30).

Dewasa ini demokrasi di Indonesia tidak mungkin terlepas dari adanya partai politik, dimana partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat yang nantinya akan disalurkan melalui kelembagaan. Demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan yang merata yaitu dengan keadilan sosial. Keadilan sosial sangat penting karena patokan islam adalah kaidah fiqh yaitu langkah-langkah kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang dipimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat dan pembelaan terhadap yang benar, hal ini menjadi salah satu tujuan dakwah. Partai politik pengemban amanah yang diserukan dan untuk atas kepentingan masyarakat.

Salah satu partai yang berasaskan Islam di Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang didalam kegiatan politiknya terdapat nilai-nilai dakwah. Fungsi pengorganisasian sangat penting dalam menghubungkan politik dengan dakwah sehingga terjadi suatu koordinasi didalam partai politik tersebut. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah suatu proses hubungan antara suatu kegiatan dakwah yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan oleh partai politik. Dengan adanya pengorganisasian dakwah, maka rencana dakwah menjadi mudah pelaksanaannya, dimana kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan partai politik akan dibagi-bagi ke dalam tugas-tugas yang lebih terperinci sehingga tugas-tugas tersebut akan memudahkan bagi pendistribusian tugas kepada para pelaksana sehingga setiap pelaksana lebih jelas dengan tugas yang diamanhkannya.

Dalam organisasinya sebagai partai politik, PKS lebih menonjolkan nilai-nilai Islam sehingga yang dilakukan PKS mengutamakan pada pengembangan dakwah Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan ideologi PKS yang digagas oleh Ustadz Hilmi pada tahun 1980, yaitu ideologi dakwah (politik-kemaslahatan dakwah) dan menjadikan partai sebagai media dari aktivitas dakwah Islam.

Partai Keadilan Sejahtera sejatinya adalah gerakan dakwah yang bersifat struktural dan kultural. Secara struktural partai ini aktif di lembaga-lembaga pemerintahan dan secara kultural partai ini berperan penting dalam ruang lingkup pesantren-pesantren, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan Majelis Ta'lim serta lembaga-lembaga Islam lainnya di masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai gerakan dakwah dinilai memiliki keunggulan dari sisi pengorganisasian. Salah satu hal yang membuat Partai Keadilan Sejahtera sampai saat ini tetap bertahan dan berpengaruh besar di masyarakat adalah karena adanya pengorganisasian yang khas dari sisi kaderisasi, yaitu adanya kedisiplinan yang diterapkan dalam sistem kaderisasi. Partai Keadilan Sejahtera memang menerapkan kedisiplinan kaderisasi dalam pengorganisasiannya, melalui kaderisasi yang terus berjalan dan setiap anggota memiliki keterikatan ideologi dan emosional sehingga pengorganisasian didalamnya secara utuh mampu untuk merealisasikan strategi dakwah baik yang bersifat vertikal dalam artian di lembaga-lembaga pemerintahan maupun secara horizontal dalam artian di masyarakat secara umum.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang sejatinya adalah gerakan dakwah dan sebagai suatu wadah kegiatan proses

penyelenggaraan aktivitas dakwah membutuhkan pengorganisasian yang mengandung koordinasi terpadunya berbagai kemampuan, keahlian masing-masing komponen. Dalam hal ini, pengorganisasian dakwah juga dapat meminimalisir akumulasi pekerjaan yang akan menyebabkan proses penyelenggaraan dakwah menjadi tidak kondusif. Selain itu, pengorganisasian juga memudahkan dalam menentukan pemilihan tenaga pelaksana dakwah yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membantu permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Aktivitas pengorganisasian dakwah yang dilakukan oleh suatu partai politik terdiri dari beberapa langkah tindakan, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, dan rentang kendali. Semua aktivitas pengorganisasian yang telah disebutkan tidak lain untuk menumbuhkan pendalaman terhadap tugas-tugas dalam penyelenggaraan dakwah. Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa manajemen dakwah mengenai studi tentang pengorganisasian dakwah sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan dakwah dalam suatu organisasi dakwah.

Oleh karena itu, dari uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk tertarik mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Fungsi Pengorganisasian Partai Politik dalam Mengembangkan Dakwah Islam (Studi Deskriptif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana spesialisasi kerja Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam?
2. Bagaimana departementalisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam?
3. Bagaimana rentang kendali Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui spesialisasi kerja Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam.
- b. Untuk mengetahui departementalisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam.
- c. Untuk mengetahui rentang kendali Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menjadi rangsangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan ilmu manajemen, terutama manajemen organisasi politik Islam, dan menjadi sumbangan pemikiran dan acuan dalam pengembangan ilmu manajemen organisasi politik Islam, khususnya dalam kajian fungsi pengorganisasian dakwah di partai politik Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak yang positif bagi berbagai partai politik atau organisasi politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik Islam, serta memberikan pengetahuan, wawasan, dan motivasi kepada seluruh umat muslim yang berminat dibidang ilmu manajemen organisasi politik Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan dakwah Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Asep Hilman (2007) dengan judul: “Fungsi Pengorganisasian dalam Pengembangan Kegiatan Dakwah Islamiyah Di Seksi Penamas Kandepag Kota Bandung”. Skripsi ini menjelaskan tentang

persoalan pengembangan dakwah Islamiyah sangat diperlukan dan memerlukan penanganan yang serius. Hambatan dalam pengembangan kegiatan dakwah Islamiyah dapat disebabkan oleh para pengurus organisasi (unsur sumber daya manusia) yang kurang kompeten di bidangnya, kekurangan jumlah pengurus, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kelemahan dalam bidang informasi dan teknologi, serta respon masyarakat yang *apriori*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh seksi Penamas Kandepag Kota Bandung dapat mengembangkan kegiatan dakwah Islamiyah. Dengan pembagian pekerjaan, pengelompokan kerja, dan pembuatan struktur organisasi, serta koordinasi yang baik dapat menyebabkan kelancaran suatu kegiatan. Hal tersebut dapat terjadi karena seksi Penamas memiliki faktor pendukung dalam pengembangan kegiatan dakwah Islamiyah seperti para pengurus dan penyuluh yang berkompoten, dukungan pemerintah dan lain sebagainya.

Kedua, skripsi yang telah disusun oleh Asep Zaelani (2014) yang berjudul “Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kinerja Partai Dakwah”. Skripsi ini menjelaskan tentang persoalan yang pertama kali timbul dalam Islam bukan keyakinan melainkan politik. Perkembangan politik tidak terlepas dari adanya organisasi politik dan pemanfaatan fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan cara menghimpun dan mengatur sumber daya manusia suatu organisasi kedalam kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

PKS merupakan partai yang didalam kegiatan politiknya terdapat nilai-nilai dakwah. Pengorganisasian dakwah sangat penting dalam menghubungkan politik dengan dakwah, sehingga terjadi koordinasi dalam partai tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengorganisasian partai terdiri dari beberapa langkah tindakan, antara lain spesialisasi kerja dengan mengacu pada tugas struktur sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sehingga bentuk spesialisasi kerja termasuk kedalam organisasi fungsional dengan menekankan pada spesialisasi SDM, yaitu kepala bagian atau ketua bidang. Departementalisasi mengacu pada tugas struktural, konsepsional, dan manajerial dengan mengelompokkan pekerjaan yang sama. Rentang kendali mengacu pada manajerial saja dan dilakukan melalui rapat harian, rapat evaluasi diprakarsai oleh majelis pertimbangan wilayah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan tentang Pengorganisasian Dakwah

a. Pengertian Pengorganisasian Dakwah

Pengorganisasian (*organizing*) sebagai fungsi manajemen yang kedua setelah perencanaan (*planning*) mempunyai peranan yang penting dalam setiap tahapan kegiatan manajerial. Dengan fungsi inilah pekerjaan dapat dengan mudah untuk dilaksanakan.

Sondang P. Siagian (2006:37) mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah suatu kegiatan menentukan, mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, menugasi orang-orang dalam kegiatan ini dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang

sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengorganisasian dakwah adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006:177).

Pengorganisasian dalam buku *Perilaku Keorganisasian* (Indriyo Gitosudarmo, 2000:2) adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitas.

Sedangkan menurut George R. Terry (1993:73) mendefinisikan pengorganisasian merupakan dasar manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pengorganisasian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian terkait dakwah (pengorganisasian dakwah) menurut penulis adalah suatu tindakan maupun aktivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi demi terealisasinya *amr ma'ruf nahi munkar* serta kemaslahatan umat.

b. Bentuk-bentuk Pengorganisasian Dakwah

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat diperlukan dalam menentukan suatu langkah tindakan kerjasama masing-masing anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun bentuk-bentuk pengorganisasian dakwah menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi (2006:120-127) meliputi:

1. Spesialisasi Kerja

Manajemen spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah “pembagian kerja”. Hakikat spesialisasi kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu akan lebih baik jika pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah, dan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan. Jadi pada hakikatnya, setiap individu memiliki spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan, bukan mengerjakan seluruh kegiatan.

Pada hakikatnya spesialisasi kerja itu ialah seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu, melainkan diklasifikasikan menjadi beberapa langkah dan tahapan, dan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda.

Para manajer dakwah melihat ini sebagai cara untuk menggunakan keterampilan para da'i secara efisien. Hal ini dimaksudkan dalam sebuah organisasi dakwah beberapa tugas pekerjaan menuntut profesionalisme dan keterampilan yang tinggi, sementara pekerjaan lain dapat dibebankan kepada para pemula. Para manajer dakwah juga harus mampu mencari efisiensi-

efisiensi lain yang dapat dicapai melalui spesialisasi kerja. Karena keterampilan seorang da'i dalam menjalankan suatu tugas akan semakin baik dan meningkat dengan dilakukan secara berulang-ulang. Pepatah mengatakan, “pengalaman adalah guru yang berharga”,

Disamping itu, hasilnya akan semakin baik dan meningkat karena dilakukan secara berulang-ulang, serta semakin sedikit waktu yang digunakan berganti tugas untuk melangkah selanjutnya. Keterampilan-keterampilan ini dapat dinyatakan dalam tiga komponen, yaitu:

1. Keterampilan teknis (*technical skill*), yaitu pengetahuan mengenai metode, proses prosedur, dan teknik untuk melakukan kegiatan khusus, serta kemampuan untuk menggunakan alat-alat dan peralatan yang relevan bagi kegiatan tersebut.
2. Keterampilan untuk melakukan hubungan antar-pribadi (*interpersonal skill*), yaitu pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses-proses hubungan antarpribadi, kemampuan untuk mengerti perasaan, sikap dari motivasi orang lain tentang apa yang ia katakan dan lakukan (empati, sensitivitas sosial), kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif (kemahiran berbicara, kemampuan persuasif), serta kemampuan untuk membuat hubungan yang efektif dan kooperatif (kebijaksanaan, diplomasi, keterampilan mendengarkan, pengetahuan mengenai perilaku sosial objek dakwah).
3. Keterampilan konseptual (*conceptual skill*), yaitu kemampuan analitis umum, berpikir nalar, kepandaian dalam membentuk konsep, serta

konseptualisasi hubungan yang kompleks dan berarti dua, kreativitas dalam mengembangkan ide serta pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa dan kecenderungan-kecenderungan yang dirasakan, mengantisipasi perubahan-perubahan, dan melihat peluang, serta masalah-masalah potensial.

Disamping itu, yang juga penting adalah pelatihan bagi para da'i untuk memperjelas spesialisasinya agar lebih efisien dan lebih mudah dalam melatih serta mengarahkannya untuk melakukan tugasnya dari sudut pandang organisasi. Spesialisasi kerja ini juga merupakan sebuah mekanisme pengorganisasian sekaligus merupakan sumber produktivitas bagi para da'i. Hal ini juga merupakan salah satu jalan untuk melakukan penghematan-penghematan yang ditimbulkan dalam pekerjaan tertentu.

Bentuk-bentuk spesialisasi dalam organisasi itu sendiri secara formal dapat dibedakan menjadi:

a. Organisasi Garis

Bentuk ini menjelaskan bahwa kekuasaan pimpinan langsung kepada kepala bagian dan kemudian kepada karyawan bawahannya.

Masing-masing bagian berdiri sendiri dan kepala bagian menjalankan fungsi pengendalian atau pengawasan dibagiannya.

Kelebihan dalam bentuk ini adalah keterpaduan kerja dan pendelegasian wewenang bisa cepat dilaksanakan. Sisi kelemahannya adalah tidak ada spesialisasi, sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien.

b. Organisasi Garis dan Staf

Bentuk ini merupakan kombinasi pemberdayaan, yaitu adanya pengawasan langsung dan spesialisasi dalam organisasi. Tugas kepala bagian yang berat dibantu oleh spesialis yang dapat memberikan saran-saran kondusif atas beberapa fungsi; untuk maksud ini bisa dibentuk sebuah jajaran staf. Mereka pada dasarnya hanya mengkomodasikan usulan atau saran konstruktif kepada pimpinan atau kepala bagian yang memiliki kewenangan dalam memberikan saran terhadap tugas khusus diluar pembagiannya, dan staf bisa membantu untuk mengatasi berbagai permasalahan sehingga meringankan tugas dan meningkatkan efisiensi kerja. Kelemahannya, kinerja staf dianggap tidak optimal bila usulan yang diberikan tidak memperoleh hasil.

c. Organisasi Fungsional

Pada bentuk ini masing-masing kepala bagian adalah spesialis dan para bawahan masih dikendalikan oleh beberapa pimpinan. Pimpinan memiliki wewenang penuh menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, bentuk ini lebih menekankan pembagian fungsi.

Adapun keuntungan organisasi fungsional antara lain:

1. Masing-masing fungsi dipegang ahli dalam bidangnya sehingga ada keselarasan antara tugas dan keahliannya.
2. Cocok untuk lingkungan yang stabil.

3. Membantu mengembangkan keahlian dan spesialisasi serta jalur yang jelas.
4. Koordinasi internal yang sederhana.

Sedangkan kelemahannya adalah:

1. Tidak ada hubungan “garis langsung” dengan atasan sehingga penyelesaian masalah bisa kurang efisien.
2. Lambat dalam sikap proaktifnya jika diterapkan pada alur kerja yang bersifat beruntun.
3. Bisa menyebabkan ketidaklancaran atau kemacetan pada alur kerja yang bersifat beruntun, dan
4. Mudah menciptakan konflik atas produk utama dan koordinasi cenderung hanya ada di puncak pimpinan.

d. Organisasi Komite

Organisasi komite merupakan asas “*brainstorming*” (arah pendapat antara berbagai unit fungsional dalam aktivitas organisasi). Fungsi organisasi ini adalah sebagai sebuah forum untuk bertukar pikiran diantara para anggota.

e. Organisasi Matriks

Bentuk pengorganisasian ini merupakan perluasan serta pengejawantahan dari struktur organisasi garis dan staf. Organisasi ini biasa disebut dengan organisasi manajemen proyek, yaitu struktur pengorganisasian yang spesialisasi antarbagiannya dipadukan untuk melaksanakan aktivitas tertentu.

Kelebihan dari organisasi matriks adalah:

1. Merupakan sebuah metode untuk memusatkan efisiensi terhadap masalah utama (masalah atau problem yang terjadi pada mad'u) dari aktivitas dakwah.
2. Memberikan keluwesan terhadap organisasi dakwah.
3. Mendorong kerja sama antarpersonal secara disiplin, sehingga dapat mengembangkan keterampilan da'i.
4. Membebaskan manajemen puncak dari beban perencanaan.

Kekurangannya adalah:

1. Berpotensi memicu budaya kerja yang tanpa sistem atau aturan mainnya tidak tegas dan jelas.
2. Terlalu banyak membutuhkan waktu untuk diskusi-diskusi daripada aksi, dan
3. Diperlukan banyak tenaga-tenaga handal dan memadai dalam kaitannya membangun hubungan antarpersonal para da'i, khususnya dalam mengatasi konflik atau masalah pada mad'u.

2. Departementalisasi

Setelah unit kerja dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya diperlukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama, sehingga dapat dikoordinasikan. Karena unit pekerjaan harus dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang kemudian dijabarkan dalam subcabang-cabang pekerjaan yang dapat dikerjakan

oleh seseorang atau beberapa orang, sehingga setiap orang yang ada didalam organisasi itu mengetahui dengan jelas tugas dan porsi kerjanya masing-masing. Ini akan memudahkan seseorang untuk mampu mengemban dan menunaikan tugasnya. Namun perlu diperhatikan, bahwa masing-masing kegiatan individu tersebut saling mengisi dan berhubungan sebagai suatu tim yang sama pentingnya dan masing-masing tidak lepas dari kerja sama tim (*team work*).

Salah satu cara yang populer untuk mengelompokkan kegiatan dakwah adalah menurut fungsi yang dijalankan. Sementara itu landasan yang digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas dakwah dalam mencapai sasaran organisasi adalah dengan departementalisasi dakwah.

Pada tataran ini, secara historis pengelompokkan kegiatan kerja dakwah adalah menurut fungsi yang dilakukan atau departementalisasi fungsional. Sebagai contoh, dalam sebuah lembaga dakwah atau manajer dakwah dalam mengorganisasikan lembaganya dengan melakukan rancangan rekayasa umat, departemen finansialnya, bagian administrasinya, departemen dakwah hal bil-hal, bil-lisan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Kelebihan atau keuntungan dari departementalisasi dakwah adalah akan memperoleh efisiensi dan mempersatukan orang-orang yang memiliki keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama kedalam unit-unit yang sama.

Joseph L. Massie (1985:76) mengemukakan bahwa departementalisasi sebagai cara membagi aktivitas dan membentuknya dalam kelompok khusus yang pada umumnya dinamakan sebagai departementalisasi. Tujuan membagi

dalam departemen-departemen adalah untuk mengkhususkan aktivitas, menyederhanakan tugas-tugas para manajer dan menegakkan pengawasan.

Menurut Sutarto (1998:66) yang dimaksud dengan departementalisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahkan bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu.

Dari pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa pada intinya pembagian aktivitas dan pembagian kerja atau pengelompokan aktivitas dan pengelompokan kerja yang dikenal dengan istilah departementalisasi adalah pembagian kerja kepada para anggota dalam organisasi yang bertujuan agar masing-masing anggota dapat dikordinasi dengan baik.

Ibnu Syamsi (2001:19) mengemukakan manfaat pembagian kerja (departementalisasi), antara lain:

- a. Pembagian tugas dalam pekerjaan atas dasar keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus dalam organisasi.
- b. Memperlancar pengawasan dengan menempatkan seorang kepala atau pimpinan yang berkompeten dalam setiap organisasi politik.
- c. Membantu memperingati tugas koordinasi unit-unit kerja yang terpisah dan tidak sama.
- d. Menghemat biaya karena dengan pembagian tugas pekerjaan dan pengelompokan dalam unit-unit kerja tidak akan terjadi kerangkapan tugas yang kerangkapan biaya.

3. Rentang Kendali

Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Walaupun pada sejarah manajemen belum ada standarisasi, yakni tidak ada kesepakatan ideal tertentu, namun dapat diukur dari tingkatan dalam organisasi. Dalam konteks organisasi dakwah, ketika seorang manajer naik dalam hierarki organisasi, maka ia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang semakin beragam kerumitannya dan tidak terstrukturisasi, oleh karena itu para pimpinan tertinggi harus memiliki rentang kendali yang lebih kecil daripada manajer-manajer menengah dan demikian seterusnya.

Dalam memahami rentang kendali yang efektif dan efisien, maka akan ditentukan dengan melihat variable kontingensi. Sebagai contoh, semakin banyak latihan dan pengalaman yang dimiliki para da'i, maka semakin berkurang pengawasan secara langsung oleh manajer. Pada variable-variabel ini juga sangat menentukan rentang yang pas mencakup kesamaan tugas para da'i, kerumitan tugas-tugas, kedekatan fisik anak buah, derajat sampai dimana prosedur-prosedur baku telah berjalan, canggihnya sistem informasi manajemen organisasi tersebut, kesulitan organisasi tersebut, serta *style* seorang manajer.

Urgensinya, konsep rentang kendali dalam pengorganisasian dakwah ini karena dapat menentukan jumlah tingkatan dan kuantitas manajer yang dimiliki oleh organisasi dakwah tersebut. Jika rentang kendali semakin luas atau semakin lebar, maka semakin efisien desain organisasi tersebut. Tapi pada titik

tertentu rentang kendali yang lebih meluas juga mengurangi efektivitas. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut perlu adanya pengembangan sumber daya para da'i yang berkesinambungan dan konstan.

Para manajer dakwah perlu memperhatikan mengenai rentang kendali yang lebih luas manakala para pelaku dakwah (da'i) dapat professional mengenai profesi mereka lebih mendalam dan intens. Penggunaan rentan kendali yang lugas dan konsisten ini dapat mengurangi pembengkakan biaya, menekan *overhead*, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan keluwesan, dan mendekatkan mad'u.

Menurut Ibnu Syamsi (2001:24-25) faktor yang mempengaruhi rentang kendali antara lain:

a. Kesamaan Fungsi

Semakin banyak kesamaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentang semakin melebar (artinya semakin banyak bawahan yang dapat dipimpin dan diawasi dengan baik).

b. Kedekatan Geografis

Semakin dekat letak penempatan kerja secara fisik, rentang semakin melebar.

c. Tingkat Pengawasan Langsung

Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan rentangan, semakin melebar.

d. Tingkat Koordinasi yang Dibutuhkan

Semakin kurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.

e. Perencanaan yang Dibutuhkan Manajer

Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.

f. Bantuan Organisasional

Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi.

2. Tinjauan tentang Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Sebelum beranjak pada pengertian partai politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal-hal yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan (Surbakti Ramlan, 1992:5). Jadi ilmu politik disimpulkan sebagai yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.

Pandangan fungsionalisme menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan para elit politik dalam mempengaruhi pemerintah, membuat dan melaksanakan

kebijakan umum (*who gets what, when and how*) diantara para ilmuwan yang menggunakan kaca mata pandangan ini adalah David Easton dan Harold Lasswell (Surbakti Ramlan, 1992:5). Sehingga bisa disimpulkan bahwa politik itu bersifat mempelajari kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi (elit politik dan lain-lain).

Menurut Mark N. Hagopian dalam buku *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Ichlasul Amal, 1996:15) partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Sedangkan menurut Gabriel A. Almond dalam buku *Sistem Politik Indonesia* (Kantaprawira Rusadi, 2004:9) partai politik yang termasuk salah satu kelompok infrastuktur politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai parpol.

b. Peran dan Fungsi Partai Politik

Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah dakwah, amar makruf dan nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi

dan peranan partai politik ini adalah untuk melakukan *check and balance*. Bisa juga disebut fungsi dan peran muhasabah li al-hukkam (mengoreksi penguasa). Inilah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh partai politik Islam ini dalam negara.

Adapun fungsi lain dari partai politik menurut Miriam Budiarto (2006: 160) diantaranya adalah:

1. Partai sebagai komunikasi politik

Yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader dan kursus penataran.

3. Partai politik sebagai sarana *recruitment* politik

Yaitu parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Yaitu partai politik berusaha mengatasi suasana persaingan dan perbedaan pendapat di masyarakat.

c. Hubungan Fungsional antara Politik dan Dakwah

Hubungan fungsional antara politik dan dakwah, sering tidak dimengerti dengan baik oleh sebagian kaum muslimin sehingga banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dengan dakwah. Bahkan, dalam masyarakat ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik, seakan-akan politik mengandung kebohongan, hipokresi, ambisi buta, penghinaan, penipuan dan berbagai konotasi buruk lainnya.

Dalam konteks ini akan menjelaskan hubungan politik dan dakwah dalam kacamata Islam. Kegiatan politik tidak perlu bertentangan dengan kegiatan dakwah. Sekaligus diharapkan dapat menghilangkan persepsi yang salah tentang politik dan juga tentang dakwah. Anggapan yang salah, misalnya bahwa politik itu bersifat memecah, sedangkan dakwah bertujuan merangkul sebanyak mungkin umat manusia, seolah ada perbedaan antara hakekat politik dan hakekat dakwah, sehingga berlaku ungkapan yang mengatakan "*Idha dakholat as-siyasatu fi syaiin afsadathu*" (bila politik sampai memasuki sesuatu bidang kehidupan tertentu, maka rusaklah bidang itu).

Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad saw agar menyeru umat manusia ke jalan Allah. Dalam menyeru umat manusia ke jalan Allah itu Nabi beserta para pengikutnya bersandar pada keterangan-keterangan yang jelas dan sambil memuji kesucian Allah, Nabi menjelaskan bahwa beliau bukan tergolong orang-orang musyrik. Dakwah dalam ayat ini adalah "*al-dakwah ila Allah*" (*ad'u ila Allah*), yaitu seruan, ajakan, panggilan dan imbauan kepada Allah.

Kegiatan dakwah Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, berhubung amar ma'ruf dan nahi munkar, juga meliputi seluruh kegiatan kehidupan. Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa para pendukung amar munkar dan nahi ma'ruf juga menggunakan setiap jalur kegiatan kehidupan. Dengan demikian, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya dapat dijadikan kegiatan dakwah; baik dakwah Islamiyah maupun dakwah jahiliyah, yakni dakwah yang menjadikan neraka sebagai muara akhir.

Dakwah adalah gerakan dalam berbagai bidang kehidupan secara simultan untuk mengubah status quo, agar nilai-nilai Islam memperoleh kesempatan untuk tumbuh subur demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Perubahan sendiri dapat bersifat reformatif atau revolusioner, tergantung pada situasi sosial, politik, ekonomi dan situasi mental-psikologik suatu masyarakat. Tauhid sebagai ruh dakwah mendorong rekonstruksi sosial yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Dengan perkataan lain, dakwah yang bersendikan tauhid senantiasa berusaha memasyarakatkan Islam sebagai agama, sebagai pandangan hidup dan sebagai paradigma pemecahan setiap masalah yang timbul dalam masyarakat modern dengan segala macam manifestasinya, dengan segala pencabangan dan perinciannya.

3. Tinjauan tentang Pengembangan Dakwah Islam

a. Pengertian Pengembangan

Pengembangan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Malayu Hasibuan, 2012:69) adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau

jabatan melalui pendidikan atau latihan. Pendidikan bertujuan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral. Sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.

Pengembangan adalah peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja (Hariandja, 2002:168).

Sedangkan menurut Mathis (2002:44) mengemukakan bahwa pengembangan adalah pertumbuhan kemampuan yang terjadi jauh melampaui apa-apa yang dituntut dalam suatu pekerjaan; hal ini mewakili usaha-usaha dalam meningkatkan kemampuan karyawan untuk menangani berbagai jenis penugasan.

b. Pengertian Dakwah Islam

Dakwah dalam paradigma Islam adalah seruan atau ajakan kepada agama Allah melalui para nabi dan rasul-Nya yang mempunyai misi mengembalikan umat manusia dari jalan yang sesat menuju jalan keselamatan yakni Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Bachtiar (1997:31) menjelaskan bahwa yang dimaksud dakwah adalah suatu proses upaya mengubah suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah yaitu al-Islam. Proses tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang terdiri dari: subjek dakwah (da'i), materi dakwah (al-Islam), metode dakwah, media dakwah, dan objek dakwah.

Quraish Shihab (1992:194) mendefinisikan dakwah merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan, usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.

Pada pengembangan atau peningkatan pelaksana dilakukan dengan adanya usaha memperkembangkan para pelaksana, yang berarti kesadaran, kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pelaku dakwah itu selalu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan potensinya, sehingga dapat diharapkan proses penyelenggaraan dakwah itu berjalan secara efektif dan efisien.

Dakwah Islam di masa kini, terlebih di masa depan, memerlukan seseorang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup terutama iman dan ketaqwaan yang tinggi. Dakwah melalui organisasi Islam yang secara fungsional bergerak dalam melakukan usaha-usaha

mengembangkan dakwah Islam sebagai jembatan dalam melakukan pengaturan aktivitas dakwah dan upayanya mewujudkan nilai-nilai syari'at Islam.

Gambar 1.1 Skema Fungsi Pengorganisasian Partai Politik (PKS) dalam Mengembangkan Dakwah Islam



Sumber: Data diolah peneliti, 2017

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menjadikan penelitian ini lebih sistematis, terarah, dan efisien, maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis pula. Adapun langkah-langkah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat, yaitu Jl. Soekarno-Hatta No. 538 A, Bandung.

Alasan diadakannya penelitian di lokasi tersebut antara lain:

- a. Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan menarik yang sesuai dengan penelitian.

- b. Karena di lokasi tersebut tersedia berbagai sumber data yang dibutuhkan selama penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Ia tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Jalaluddin Rakhmat, 1985:34). Penulis memilih metode tersebut dengan alasan bahwa metode ini dapat menggambarkan masalah terhadap tujuan penelitian, sekaligus menemukan faktanya.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini juga berupa penelitian yang data-datanya diperoleh dari lapangan, observasi, catatan lapangan, arsip-arsip dokumen resmi, dan hasil wawancara. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diperiksa kembali demi tercapainya kesesuaian dari apa yang diteliti.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggali data dari berbagai sumber. Adapun peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan objek penelitian diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum Bidang Administrasi dan Organisasi, dan Staf Bidang Humas dan Publikasi.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang membantu atau sebagai pelengkap dari sumber data primer yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat dibagian Lembaga Dakwah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pengorganisasian dakwah partai politik, kliping, media online, data-data arsip dan dokumen penting berkaitan dengan pengorganisasian dakwah partai politik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data (Suharsimi Arikunto, 1990:134). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang dianggap relevan untuk terlaksananya penelitian ini. Untuk membantu pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki (Sutrisno

Hadi, 1986:134). Didalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden (Sutrisno Hadi, 1986:134).

Teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian melalui pertanyaan kepada informan yang sudah dipersiapkan, tetapi cara penyampainnya dilangsungkan secara bebas dan terikat oleh pedoman wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan dokumen sebagai sumber data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti dengan cara melihat dan mengamati langsung (Sutrisno Hadi, 1986:134).

Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi umum daerah penelitian dan data-data yang masih ada kaitannya dengan pengorganisasian dakwah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2006:244). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana analisis data tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sehingga datanya sudah jenuh (Milles dan Huberman, 1984:338). Analisis data secara kualitatif menurut Milles dan Huberman (1984:21-23) memiliki langkah-langkah sebagai berikut: “mereduksi data, *display* data, menyimpulkan dan verifikasi.” Adapun uraian penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi (rangkuman) data, dilakukan pencatatan di lapangan dan dirangkum dengan mencari hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan.

b. *Display* (Kategorisasi)

Display data artinya mengkategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah menyimpulkan dan verifikasi (dibuktikan), dengan data-data baru yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian.